



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IBRAHIM BAFADAL**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA**
3. NHK : **210298**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.670.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/170 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
2. Tanah Seluas 414 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/320 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/102 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 481.100.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 5.1 RS CVT (CKD) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.100.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	576.068.696
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.782.918.696
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.782.918.696

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.